

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.¹ Secara sederhana demokrasi yaitu sistem dimana warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih masing-masing secara bebas dapat memilih pemimpin dan wakil-wakilnya di parlemen(*one man one vote*). Menurut David Lechmann demokrasi adalah suatu metode politik. Sedangkan, pemilu sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.²

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih wakil rakyat diparlemen dan memilih pejabat tertentu yang duduk di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu syarat berlangsungnya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak memilih dan dipilih sendiri diatur dalam Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum,

¹Miriam Budiardjo. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 109

²Heru Nugroho. 2012. Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 1(1) Hlm. 2

bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Pemilu adalah dasar dari salah satu instrumen demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat diubah menjadi sebuah kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif.⁴ Pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, arena kontestasi yang adil bagi partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg). Sejauh mana parpol telah menjalankan fungsi dan perannya, serta akuntabilitas atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat akan memilih yang mereka anggap paling dapat diandalkan dan cocok untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang beragam. Sebagai peserta pemilu, parpol dinilai akuntabilitasnya secara jujur dan adil oleh masyarakat setiap lima tahun sekali, serta mampu membuktikan eksistensinya dengan cara diuji melalui penyelenggaraan pemilu.

Pemilu secara singkat dapat diartikan sebagai proses untuk memilih orang yang akan mewakili rakyat untuk duduk dalam pemerintahan, dimana pemimpinnya atau perwakilannya dipilih berdasarkan suara terbanyak. Menurut Morissan, pemilu adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilu yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk

³Undang-undang 39 Tahun 1999 Pasal 43 tentang Hak Asasi Manusia

⁴Moch. Nurhasim. 2014. Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*. 11(1). Hlm. 149

melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara.⁵

Pemilihan legislatif (pileg) merupakan salah satu turunan dari pemilu, dalam pileg yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan presiden (Pilpres) memiliki kaitan erat yaitu presiden yang terpilih membutuhkan koalisi parpol yang kuat untuk menjaga stabilitas kepemimpinannya dan anggota legislatif yang dapat mengesahkan kebijakan yang dibuatnya. Sedangkan bagi parpol juga memiliki kebutuhan untuk menjaga eksistensinya ditengah persaingan parpol yang semakin ketat di Indonesia. Baik melalui jalur pro pemerintah maupun mengambil sisi oposisi untuk melaksanakan fungsi *check and balance* dalam pemerintahan.

Dalam pemilu, erat kaitannya dengan perilaku memilih. Definisi perilaku memilih menurut Ramlan Surbakti adalah keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Kalau memutuskan memilih, apakah memilih partai atau kandidat X ataukah partai atau kandidat Y.⁶ Memilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi sasaran utama kontestan untuk dipengaruhi dan diyakinkan, agar memilih dan memberikan suaranya kepada kontestan tersebut.

Dalam teori perilaku memilih, terdapat tiga pendekatan yang mempengaruhi perilaku memilih seseorang dalam memberikan pilihannya yaitu pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Dalam ilmu politik terdapat dua macam

⁵ Morissan. 2005. *Hukum tata negara RI era reformasi*. Jakarta. Ramdina Prakarsa. Hlm. 17

⁶ Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami ilmu politik*. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 145

teori perilaku memilih yang dapat dikelompokkan dalam dua mazhab/pendekatan besar. Yaitu mazhab sosiologis atau Columbia yang dipelopori oleh Columbia's University Bureau of Applied Social Science dan mazhab psikologis atau Michigan yang dikembangkan oleh University of Michigans Survey Research Center.⁷ Setelahnya muncul lah ketiga yaitu mazhab ekonomis atau pilihan rasional mulai populer dalam ilmu sosial yaitu teori yang melihat untung-rugi yang diperoleh oleh masyarakat. Teori pilihan rasional menurut James Coleman menekankan pada tindakan perseorangan yang memiliki tujuan serta ditentukan oleh nilai.⁸

Sangat banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Maka dalam penelitian ini mengambil ketiga pendekatan tersebut dalam melihat perilaku memilih di suatu daerah. Faktor asal daerah merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam pendekatan sosiologis dimana partai politik atau calon pejabat publik yang punya asal-usul atau keterikatan dengan daerah tertentu condong akan didukung oleh pemilih dari daerah bersangkutan.⁹

Selanjutnya, jika dilihat dari pendekatan psikologis dalam pemilu era modern. Dimana pileg dilakukan serentak dengan pilpres erat kaitannya dengan *coattails effect*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat oleh David J Samuel yaitu *"The timing of elections matters because, as Shugart (1995) has demonstrated, the closer the presidential election is to the legislative election, the greater is the*

⁷Afan Gaffar. 1992. *Javanese Voters: A case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. Jogjakarta. Gajah Mada University Press Hlm. 4-9

⁸Goerge Ritzer. 2004. *Encyclopedia of Social Theory*. College Park. SAGE Publications Inc. Hlm 111

⁹ Saiful Mujani, R.Wilian Liddle, & Kuskridho Ambard, 2012. *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Mizan hlm.19-20.

coattails effect of the former on the latter, and thus the greater its potential reductive influence".¹⁰ David Samuel berpendapat bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shugart tahun 1995 bahwa "Waktu pelaksanaan pemilu penting karena, semakin dekat waktu pelaksanaan pemilu presiden dengan pemilu legislatif, semakin besar efek ekor jas pemilu presiden terhadap pemilu legislatif, dan dengan demikian semakin besar pula potensi pengaruhnya yang bersifat reduktif". Dengan kondisi Indonesia yang menerapkan pemilu serentak, efek ekor jas menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam Pemilu.

Arenas juga berpendapat terkait dengan *coattail effect*. Ia menjelaskan bahwa *coattail effect* adalah tentang adanya hubungan positif antara kekuatan elektoral seorang capres dan partai yang mengusungnya.¹¹ Artinya, seorang capres atau presiden yang populer dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif secara elektoral kepada partai yang mengusungnya sebagai calon. Tak jarang, parpol dan kandidat berharap mendapatkan limpahan suara dari seorang capres dan cawapres. Bahkan, beberapa peneliti berpendapat eksplisit bahwa *coattail effect* sebagai bentuk strategi dari partai dan kandidat dengan cara mengeksploitasi dan menempel kepada tokoh populer (presiden).

Dalam pendekatan pilihan rasional, indikator politik uang juga memainkan peran krusial dalam perpolitikan di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Berbagai politisi hingga lembaga riset memiliki pendapat yang simpang siur terkait

¹⁰ David Samuels and Fernando Luiz Abrucio. 2000. *Federalism and Democratic Transitions: The 'New' Politics of the Governors in Brazil*. *Publius: The Journal of Federalism*. 30(2) Hlm. 53

¹¹ Andreu Arenas. 2024. Coattail Effects and Turnout: Evidence from a Quasi-Experiment. *Research and Politics* 11(1) Hlm. 3

biaya pasti untuk mendapatkan 1 kursi di parlemen. Mengutip perkataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa ada biaya politik sekitar Rp40 miliar yang diperlukan jika seseorang ingin menjadi anggota legislatif DPR RI di Dapil DKI Jakarta.¹² Hal ini memperlihatkan bahwa ongkos politik di Indonesia sangat tinggi dan menunjukkan politik bukan untuk kaum menengah kebawah. Terdapat kekhawatiran dalam melihat kondisi mahal nya ongkos politik di Indonesia. Ancaman terbesar dan paling umum yaitu praktik politik uang, politik uang dapat subur dan berkembang di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini.

Praktik politik uang yang melibatkan politisi dan pemilih dalam pemilu legislatif. Jika menggunakan estimasi paling tinggi, lebih dari sepertiga pemilih pada Pemilu 2019 lalu terpapar praktik jual-beli suara, sehingga menempatkan Indonesia berada di peringkat tiga besar negara yang paling banyak melakukan politik uang di dunia. Politik uang bukan lagi sesuatu yang tabu dalam pemilu dan telah menjadi normalitas baru (*new normal*) dalam pemilu pasca-orde Baru.¹³ Tak heran jika demokrasi di Indonesia dikenal luas sebagai demokrasi patronase.¹⁴ Mengingat, Politik uang tidak hanya berbentuk pembelian suara namun juga bisa berbentuk barang ataupun kegiatan. Pemberian barang dan memfasilitasi kegiatan kerap kali tidak bisa dibedakan dengan sedekah atau pemberian bantuan.

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/12/18470221/cak-imin-sebut-jadi-anggota-dpr-dari-jakarta-butuh-rp-40-miliar> diakses pada 6 Juni 2024 pukul 1:54 WIB.

¹³ Burhanuddin Muhtadi,. 2019. Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*. 5(1) Hlm.

¹⁴ Edward Aspinall, Ward Berenschot. 2019. *DEMOCRACY FOR SALE Pemilu, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Hlm. 55

Penelitian mengenai perilaku memilih sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti Atalla Azzahra Sukarno (2023),¹⁵ Deane Fitriani (2023),¹⁶ Mohammad Fadilah Akbarsyah (2023),¹⁷ Reza Septian Kamajaya (2021),¹⁸ yang membahas perilaku memilih menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Novfrimansyah (2022),¹⁹ dan Aldila Putra Pratama (2020)²⁰ telah membahas mengenai *coattail effect* di Sumatera Barat. Dan Ni Ketut Artini (2020),²¹ M. Rizky (2021),²² dan Yamen Sony Aprizanda (2023),²³ dan Syahirah Atikah Saferlin (2024)²⁴ membahas mengenai Perilaku memilih masyarakat dalam

¹⁵Atalla Azzahra Sukarno, 2023, Perilaku Pemilih dan Pilpres Studi pengaruh perilaku pemilih terhadap Pemilihan Presiden 2019 di Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, *Skripsi*, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

¹⁶Deane Fitriani, 2023, Partisipasi dan Perilaku perilaku pemilih pemula dalam Pemilihan Umum serentak 2019 (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta), *Skripsi*, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

¹⁷Mohammad Fadilah Akbarsyah, 2023, Pengaruh Partisipasi dan Perilaku pemilih pemula terhadap Pemilihan Presiden tahun 2019 Studi pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, *Skripsi*, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

¹⁸Reza Septian Kamajaya, 2021, Perilaku Pemilih (Studi Pilihan Partai Politik pada Pemilu Legislatif Dapil Banten III Tahun 2019), *Skripsi*, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

¹⁹Novrimansyah. 2022. Coattail Effect Prabowo Terhadap Perolehan Suara Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Padang Panjang *Skripsi*. Padang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

²⁰Aldila Putra Pratama Pratama. 2020. Prabowo Effect Terhadap Kemenangan Andre Rosiade Pada Pemilu 2019 DPR-RI Dapil 1 Sumatera Barat. *Skripsi*. Padang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

²¹Ni Ketut Artini, 2020, Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar, *JIDS Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Hlm 329-348.

²²M. Rizky, 2021, Perilaku memilih masyarakat muslim pada pemilihan legislatif (Studi Kasus Kecamatan Sukarami, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan), *Skripsi*, Palembang: Fakultas adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

²³Yamen Sony Aprizanda, 2023, Perilaku memilih Masyarakat Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, *Tesis*, Padang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

²⁴Atikah Syahirah Saferlin. 2024. Hubungan Tingkat Kepercayaan Politik Kepada Calon Legislatif Perempuan Terhadap Perilaku Memilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Padang. *Skripsi*. Padang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

pemilihan legislatif. Serta Muhammad Padli (2020),²⁵ yang membahas mengenai orientasi masyarakat Sumbar terhadap kandidat melalui 3T (takah, tokoh, tageh). Rino Adi Prasetyo (2024)²⁶ telah membahas terkait hubungan etnisitas dalam perilaku memilih. Siti Nadila (2020),²⁷Perhat Alvaz, Suswanta(2021),²⁸ Rizka Halida,dkk(2022)²⁹ Intan Juleha (2023)³⁰, Ridho Alamsyah(2023)³¹, telah membahas terkait politik uang pada Pileg di Indonesia.

Dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian terkait perilaku memilih sudah sangat banyak dilakukan, akan tetapi penelitian yang terfokus membahas asal daerah, *coattail effect* (efek ekor jas) dan *money politics* (politik uang) masih sangat jarang ditemukan menjadi variabel bebas (X). Padahal, efek ekor jas dan politik uang memiliki andil besar dalam keterpilihan Caleg dalam perpolitikan di Indonesia dalam beberapa edisi Pemilu belakangan.

²⁵ Muhammad Padli. 2020. Pengaruh Takah, Tageh, Tokoh Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Sumbar Pada Pilpres Tahun 2019. *Skripsi*. Padang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

²⁶ Rino Adi Prasetyo. 2024. Perilaku Memilih Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Skripsi*. Padang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

²⁷ Siti Nadila. 2020. Pengaruh Praktik Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Masyarakat Di Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. *Skripsi*. Padang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

²⁸ Perhat Alfaz and Suswanta Suswanta. 2021. Bentuk Dan Jaringan Patron-Klien Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 2(3). Hlm 170-183,.

²⁹ Rizka Halida et al. 2022. Vote-Selling as Unethical Behavior: Effects of Voter's Inhibitory Self-Control, Decision Toward Vote-Buying Money, and Candidate's Quality in Indonesia Election. *Journal of Social and Political Psychology*. 10(2). Hlm. 570–587.

³⁰ Intan Juleha. 2024. Hubungan Politik Uang Dengan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif Kota Padang 2019. *Skripsi*. Padang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

³¹ Ridho Alamsyah. 2023. Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Pada Pemilihan Legislatif 2019. *Skripsi*. Semarang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Walisongo.

Penelitian ini bermaksud untuk mengisi kekosongan penelitian-penelitian terdahulu. Dan penelitian ini secara keilmuan penting untuk menambah penjelasan tentang perilaku memilih masyarakat terhadap caleg di suatu Kab/Kota. Dinamika pada kontestasi politik daerah menjadi hal yang selalu hangat untuk diperbincangkan dikarenakan kecenderungan manusia untuk tertarik akan hal-hal yang berada disekitarnya apalagi sampai mengenali hal tersebut. Melihat akan hal ini, peneliti melihat satu fenomena yang menarik untuk digali dan didalami. Yaitu, caleg petahana dikalahkan oleh caleg pendatang baru yang tidak berlatar belakang politik tetapi memiliki kekuatan ekonomi yang diatas rata-rata yang berhasil mengkooptasi suatu daerah dengan sangat baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang perilaku memilih masyarakat Padang Pariaman pada pemilihan legislatif DPR RI tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilu serentak 2024 yang dihelat pada 14 Februari 2024 menjadi pusat perhatian masyarakat. Pesta rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan menduduki kursi eksekutif tertinggi dan legislatif di segala tingkatan dalam 5 tahun kedepan. Pileg kali ini terlihat lebih sengit daripada tahun-tahun sebelumnya dimana terdapat 18 parpol nasional yang berpartisipasi. Semua parpol yang bertanding dengan caleg-caleg terbaiknya tentunya tidak hanya harus mencari suara sebanyak banyaknya untuk pribadi. Namun, dituntut untuk lolos ke parlemen dengan syarat suara partai harus diatas 4% suara sah.

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Partai Nasional yang Lolos Parlemen

Tahun	Jumlah Partai Peserta Pemilu	Lolos Parlemen	Non Parlemen	Ambang batas
2014	12	10	2	3,5%
2019	16	9	7	4%
2024	18	8	10	4%

Sumber : Data Sekunder, Publikasi KPU 2024

Terdapat beberapa fenomena yang tampak menghiasi pileg pada beberapa pemilu belakangan yaitu *coattail effect* (efek ekor jas), ongkos politik yang tinggi dan popularitas memainkan peranan besar terhadap keterpilihan. Dengan adanya pemilihan umum serentak antara Pileg dan Pilpres sangat memungkinkan untuk efek ekor jas berupa limpahan suara dari Capres yang menguntungkan Parpol dan Caleg. Berbanding lurus dengan semakin ketatnya persaingan antar parpol dan antar caleg. Ongkos politik seseorang yang ingin maju berkontestasi dalam Pileg semakin tinggi. Semakin banyak kompetitor untuk jumlah kursi yang relatif sama dari tahun-tahun sebelumnya membuat seorang caleg haruslah dikenal, sebelum akhirnya dapat dipilih. Oleh sebab itu, tak jarang marketing yang dilakukan caleg menggelontorkan dana yang tidak sedikit yaitu berkisar puluhan miliaran rupiah.

Dewasa ini, fenomena yang terjadi dalam beberapa pemilu belakangan adalah calon yang terpilih tidak jarang merupakan bukan orang-orang dengan latar belakang politik melainkan orang-orang yang kaya atau terkenal. Hal ini terjadi secara nasional hingga ke tingkat daerah, hal ini disebabkan karena dalam pemilu terdapat 3 tahapan bagi seorang kandidat yaitu pertama popularitas (keterkenalan), Akseptabilitas (diterima) dan terakhir elektabilitas (dipilih).

Pileg yang dilakukan di seluruh Indonesia dibagi menjadi daerah pemilihan (dapil). Untuk 575 kursi DPR-RI yang tersedia dibagi kedalam 84 dapil dari 38

Provinsi di Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dibagi menjadi 2 dapil untuk 14 kursi parlemen yang tersedia. Dapil 1 Sumbar meliputi 11 Kab/Kota untuk 8 kursi, sedangkan dapil 2 meliputi 8 Kab/ Kota. Dapil ini meliputi wilayah Sumbar bagian utara yaitu Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh. Persaingan ini tentunya semakin menarik di daerah yang tidak dominan oleh satu parpol, apalagi kursi yang tersedia terbatas. Sumbar Dapil 2 adalah salah satunya dengan hanya 6 kursi yang diperebutkan dengan tidak ada parpol dominan membuat hanya caleg terbaik di partainya yang akan melenggang ke senayan. Di dapil ini terhitung dari pemilu 2014, 2019 hingga 2024 masing-masing partai hanya akan meloloskan peraih suara terbanyak di partainya.

Tabel 1.2 Perbandingan Perolehan Suara dan Asal Daerah Caleg terpilih Dapil Sumbar 2, Pemilu 2019 & 2024

Pemilu 2019			Pemilu 2024			
Nama Caleg (Asal Daerah)	Suara Caleg	Partai	Nama Caleg (Asal Daerah)	Suara Caleg	Suara di Daerah	Partai
Mulyadi (Bukittinggi)	144.954	Demokrat	Mulyadi (Bukittinggi)	103.683	13.876	Demokrat
Nevi Zuairina (Jakarta)	52.141	PKS	Nevi Zuairina (Jakarta)	68.564	-	PKS
Ade Rezki Pratama (Bukittinggi)	104.740	Gerindra	Ade Rezki Pratama (Bukittinggi)	68.418	9.847	Gerindra
John Kennedy Azis (Padang Pariaman)	43.540	Golkar	Benny Utama (Pasaman)	75.255	54.014	Golkar
Gusparadi Gaus (Bukittinggi)	56.365	PAN	Arisal Aziz (Padang Pariaman)	107.117	56.913	PAN
Muhammad Iqbal(Medan)	28.949	PPP	Cindy Monica Salsabila Setiawan (Padang)	97.677	-	Nasdem

Sumber: Data Sekunder, Publikasi KPU diolah oleh Peneliti 2025

Pileg di Dapil Sumbar 2 semakin menarik untuk dibahas karena 4 dari 6 petahana yang kembali bertarung sebagai legislator gagal mempertahankan posisinya. Yaitu Rezka Oktoberia (2020-2024) dari Demokrat, John Kennedy Azis dari Golkar dan Guspardi Gaus dari PAN. Ketiganya tidak terpilih karena gagal mendapatkan perolehan suara terbanyak di partainya masing-masing. Sedangkan, Muhammad Iqbal tidak lolos karena suara yang lebih sedikit daripada caleg terpilih, sekaligus partainya yaitu PPP tidak memenuhi *parliamentary threshold*. Usai putusan rekapitulasi KPU, PPP hanya memperoleh 3,87% sedangkan ambang batas harus mencapai 4% suara sah untuk masuk ke parlemen.

Mulyadi (Demokrat) sukses mengambil kembali kursinya yang sebelumnya ia berikan kepada melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Rezka Oktoberia pada 2020 karena mencalon sebagai Gubernur Sumbar. Selanjutnya, Benny utama (Golkar) yang merupakan Bupati 2 periode Kabupaten Pasaman untuk periode 2010-2020 dan menjadi DPRD Sumbar untuk 2019-2024 berhasil mengungguli caleg Golkar lainnya dan melaju ke senayan. Sedangkan 2 caleg lainnya merupakan politisi yang baru mencuat menjelang Pileg 2024 bergulir dan tanpa latar belakang politisi. Yaitu Arisal Aziz yang merupakan CEO Indah Cargo Logistik yang maju dari Partai PAN dan Cindy Monica Salsabila Setiawan seorang caleg muda dari Partai Nasdem.

Padang Pariaman sebagai salah satu Kabupaten/Kota di Dapil Sumbar 2 DPR-RI yang sangat menarik untuk diteliti dalam sudut pandang perpolitikan dan kondisi sosio-kultural dalam masyarakatnya. Dikarenakan kondisi demografi Kabupaten Padang Pariaman tergolong homogen. Jumlah penduduk Padang

Pariaman pada tahun 2025 adalah 467.038 jiwa dengan populasi laki laki sebanyak 234.856 jiwa dan perempuan 232.182. Mayoritas masyarakat Padang Pariaman merupakan pemeluk agama islam dengan 99,54 %, kristen protestan 0,34% dan kristen katolik sebanyak 0,11%. Sedangkan untuk ketersediaan rumah ibadah terdapat 385 Masjid dan 2391 mushola sedangkan hanya terdapat masing-masing satu gereja protestan dan gereja katolik di Padang Pariaman yang berada di Kecamatan Batang Anai.³² Padang Pariaman merupakan Kabupaten terkecil kedua di Sumatera Barat dengan luas 1.343,56² dengan hanya menyumbang 3,2 luas daratan Sumatera barat.³³ Namun, memiliki populasi penduduk terbesar ke 5 di Kab/Kota di Sumatera Barat.

Karakteristik masyarakat Pariaman juga memiliki keunikan tersendiri dimana masyarakat Pariaman (Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman) sangat menjunjung tinggi kedaerahan. Dalam konteks politik dapat tercermin dari sejarah beberapa pemilu sebelumnya. Semenjak pemilu dengan proporsional terbuka pertama kali pada tahun 2004 hingga pemilu terakhir 2024. Selalu ada Anggota DPR-RI yang berasal dari Pariaman. Refrizal (2004-2019), John Kenedy Aziz (2014-2024), Arisal Aziz (2024-2029) dan Cindy Monica Salsabila Setiawan (2024-2029). Selanjutnya, berdasarkan data diatas (Tabel 1.2) dapat dilihat terdapat 3 Kab/Kota yang mengirimkan putra daerahnya ke senayan dari Dapil 2 Sumbar yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Padang Pariaman.

³² BPS Padang Pariaman. 2025. *Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka*. vol. 26. Padang Pariaman: BPS Kabupaten Padang Pariaman.

³³ BPS Sumbar, *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025*. vol. 55. Padang : BPS Provinsi Sumatera Barat.

Menariknya hanya Arisal Aziz yang belum memiliki pengalaman berpolitik bahkan mengungguli kandidat lainnya. Jika dilihat perolehan suara di daerah asal Arisal juga yang terbanyak dengan 56. 913 suara atau 53,13% dari total suara berasal dari Padang Pariaman.

Hal ini sesuai dengan penelitian Eka Vidya Putra³⁴, dimana masyarakat Pariaman mempertimbangkan aspek kesamaan daerah, kedekatan dengan kandidat, latar belakang ekonomi dan *track record* kandidat dalam Pilkades. Selain itu, Eka juga meneliti dalam Pemilu masyarakat Pariaman menilai kandidat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi berarti tidak serius dalam kontestasi. Ia mendapatkan bahwa bentuk politik uang yang umum dilakukan adalah pembelian suara, pemberian barang dan jasa. Politik uang ini cukup efektif dimana sebanyak 58,33% menjawab akan mempertimbangkan memilih kandidat yang memberikan bantuan, sedangkan 34,17% menjawab tidak dan 7,5% menjawab tidak tahu. Dari yang menjawab Ya, sebanyak 47,06% responden menjawab tidak akan memilih. Sedangkan 36,97% menjawab ya dan 15,97% menjawab tidak tahu.³⁵ Berdasarkan data diatas bahwa Kabupaten Padang Pariaman sangat menarik untuk diteliti berdasarkan aspek demografi, geografis dan karakteristik sosio-kultural masyarakat terutama dalam konteks pemilu.

Faktor Kedaerahan yang sudah disebutkan diatas berbanding lurus dengan perolehan suara mereka dalam kontestasi pileg lalu. Tercatat secara keseluruhan

³⁴ Putri Nadila and Eka Vidya Putra. 2019. Sumber Kekuasaan Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Perilaku Memilih Masyarakat Di Desa Naras 1 Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. *Jurnal Perspektif*. 6,(2).

³⁵ Eka Vidya Putra. 2018. Money Politics Dalam Penyelengaran Pemilihan Umum Di Kota Pariaman. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*. 4(1).

suara sah di Kabupaten Padang Pariaman Arisal Aziz (56.913/27,31%) menjadi pemenang, diikuti Cindy Monica (21.333/10,23%). Selanjutnya Nevi Zuairina (10.742/5,15%), John Kenedy Azis (9.992/4,79%) dan Tri Suryadi (9.583/5,60%). Dapat dilihat Arisal dan Cindy dapat mengkooptasi daerah dengan baik. Hal itu berbanding lurus dengan perolehan mereka di masing-masing Kecamatan. Berikut persebaran pemenang di masing-masing Kecamatan di Padang Pariaman.



Tabel 1.3 3 Caleg dengan Perolehan Suara Terbanyak per Kecamatan

Kecamatan	Total Suara Sah	Caleg 1 Suara (Persentase)	Caleg 2 Suara (Persentase)	Caleg 3 Suara (Persentase)
Lubuk Alung	22.065	Arisal Aziz 5.863 (26,57%)	Nevi Zuairina 1.689 (7,65%)	Cindy Monica 1.678 (7,60%)
Batang Anai	25.192	Arisal Aziz 5.067 (20,11%)	Tosriadi Jamal 1.727 (6,86%)	Nevi Zuairina 1.634 (6,49%)
Nan Sabaris	14.815	Arisal Aziz 2.775 (18,73%)	Cindy Monica 2.550 (17,21%)	John Kenedy Azis 1.287 (8,69%)
2x11 Enam	9.519	Arisal Aziz 3.165 (33,25%)	Cindy Monica 1.143 (12,01%)	Nevi Zuairina 606 (6,37%)
Lingkuang VII Koto	17.779	Arisal Aziz 5.109 (28,74%)	Cindy Monica 2.495 (14,03%)	Nevi Zuairina 1.282 (7,21%)
Sungai Sarik V Koto	11.492	Arisal Aziz 6.647 (57,84%)	Cindy Monica 765 (6,66%)	Tri Suryadi 476 (4,14%)
Kampung Dalam	14.491	Arisal Aziz 3.665 (25,29%)	John Kennedy Aziz 2.261 (15,60%)	Cindy Monica 1.323 (9,13%)
Sungai Limau	14.336	Tri Suryadi 3.881 (27,07%)	Arisal Aziz 3.371 (26,30%)	Cindy Monica 916 (6,39%)
IV Koto Aur Malintang	9.583	Arisal Aziz 1.993 (20,80%)	Cindy Monica 835 (8,71%)	John Kenedy Azis 607 (6,33%)
Ulakan Tapakih	9.542	Arisal Aziz 2.367 (24,81%)	Cindy Monica 1.038 (10,88%)	Nevi Zuairina 539 (5,65%)
Sintuak Toboh Gadang	9.405	Arisal Aziz 2.033 (21,62%)	Cindy Monica 994 (10,57%)	Dhifla 770 (8,19%)
Padang Sago	4.362	Arisal Aziz 1.037 (23,77%)	Cindy Monica 873 (20,01%)	Nevi Zuairina 366 (8,39%)
Batang Gasan	5.176	Arisal Aziz 1.441 (27,84%)	Cindy Monica 549 (10,61%)	John Kenedy Azis 300 (5,80%)
V Koto Timur	7.429	Arisal Aziz 3.129 (42,12%)	Cindy Monica 623 (8,39%)	Guspari Gaus 343 (4,62%)
2x11 Kayu Tanam	13.383	Arisal Aziz 2.461 (18,39%)	Cindy Monica 2.148 (16,05%)	Ade Reski 951 (7,11%)
Patamuan	8.641	Arisal Aziz 2.923 (33,83%)	Cindy Monica 951 (11,01%)	Nevi Zuairina 498 (5,76%)
Enam Lingkung	10.718	Arisal Aziz 3.468 (32,36%)	Cindy Monica 1.128 (10,52%)	Nevi Zuairina 684 (6,38%)
Total	208.385			

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024

Dapat dilihat dari 17 Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Arisal Aziz memenangkan 16 diantaranya. Arisal hanya mendapatkan kekalahan di Kecamatan

Sungai Limau oleh Tri Suryadi yang merupakan putra daerah tersebut dengan hanya tertinggal 110 suara. Sama halnya dengan Cindy Monica dimana memperoleh Suara terbanyak kedua di 14 Kecamatan serta di 3 Kecamatan memperoleh suara terbanyak ketiga. Menarik untuk melihat bagaimana faktor yang dominan dalam keberhasilan mereka mendapatkan kursi di parlemen dan memenangkan hati masyarakat Padang Pariaman. Faktor “putra daerah” dirasa memiliki pengaruh cukup kuat berdasarkan perolehan suara di masing masing kecamatan diatas.

Gambar 1.1 Salah Satu Caleg dengan Judul Berita Pengusaha Asal Piaman



Tabel 1.4 Perbandingan Suara Capres di Sumbar dan Padang Pariaman

No	Pasangan Calon	Suara Provinsi	Persentase	Suara Padang Pariaman	Persentase
1	Anies-Imin	1.581.258	55,63%	136.981	68,73%
2	Prabowo-Gibran	1.143.849	40,24%	57.658	28,93%
3	Ganjar-Mahfud	117.072	4,11%	4.644	2,33%

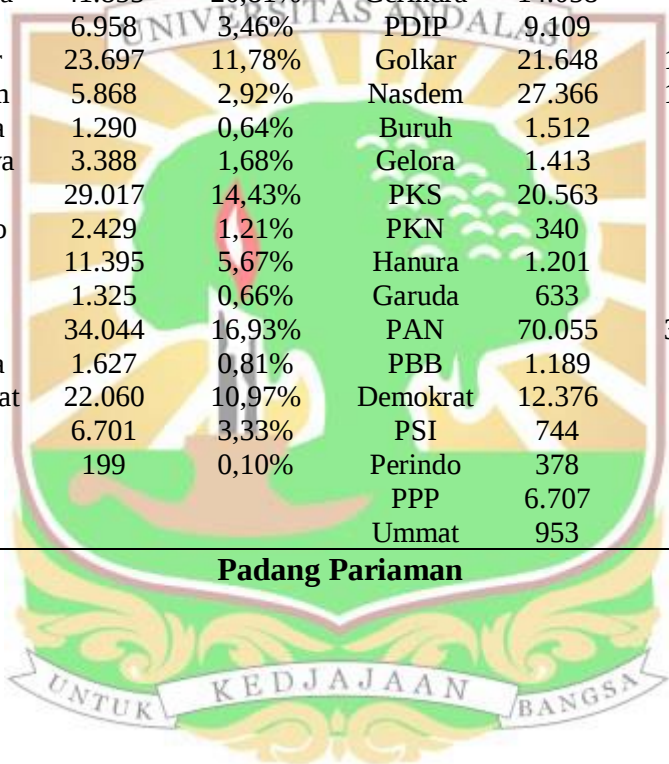
Sumber : Model D Hasil PPWP Kabupaten Padang Pariaman

Sumbar sendiri merupakan satu dari 2 Provinsi yang perolehan suara pasangan Capres nomor urut 1 Anies-Muhaimin unggul. Tak heran, Parpol pengusung dan Caleg dari Parpol tersebut mendapatkan limpahan suara, apalagi Caleg dengan nomor urut pertama. Tak terkecuali untuk daerah Kab. Padang

Pariaman sebagai lumbung suara pasangan Anies-Imin dikarenakan faktor Anies dan Muhaimin dianggap merupakan pasangan paling diterima oleh kalangan masyarakat di Padang Pariaman karena faktor citra dan branding agamis yang dilakukan.

Tabel 1.5 Perbandingan perolehan suara parpol pada pileg 2019 dan 2019 di

Pemilu 2019			Pemilu 2024		
Partai	Suara	Persentase	Partai	Suara	Persentase
PKB	9.233	4,59%	PKB	18.128	8,70%
Gerindra	41.855	20,81%	Gerindra	14.058	6,75%
PDIP	6.958	3,46%	PDIP	9.109	4,37%
Golkar	23.697	11,78%	Golkar	21.648	10,39%
Nasdem	5.868	2,92%	Nasdem	27.366	13,13%
Garuda	1.290	0,64%	Buruh	1.512	0,73%
Berkarya	3.388	1,68%	Gelora	1.413	0,68%
PKS	29.017	14,43%	PKS	20.563	9,87%
Perindo	2.429	1,21%	PKN	340	0,16%
PPP	11.395	5,67%	Hanura	1.201	0,58%
PSI	1.325	0,66%	Garuda	633	0,30%
PAN	34.044	16,93%	PAN	70.055	33,62%
Hanura	1.627	0,81%	PBB	1.189	0,57%
Demokrat	22.060	10,97%	Demokrat	12.376	5,94%
PBB	6.701	3,33%	PSI	744	0,36%
PKPI	199	0,10%	Perindo	378	0,18%
			PPP	6.707	3,22%
			Ummat	953	0,46%
Padang Pariaman					



Sumber: Data Sekunder, diolah oleh Peneliti 2025

Berdasarkan tabel 1.5 diatas dapat dilihat fluktuasi perolehan suara Parpol pada Pileg DPR-RI di Kabupaten Padang Pariaman. terdapat beberapa partai yang memperoleh peningkatan suara yang signifikan seperti PKB, Nasdem dan PAN.

Sementara, beberapa partai justru memperoleh penurunan suara yang signifikan seperti Gerindra, PKS dan Demokrat.

Tabel 1.6 Perolehan Suara Partai Pengusung Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu 2024.

1. Anies-Muhaimin	Perolehan Suara	2. Prabowo-Gibran	Perolehan Suara	3. Ganjar-Mahfud	Perolehan Suara
PKB	18.128	Gerindra	14.058	PDIP	9.109
Nasdem	27.366	Golkar	21.648	PPP	6.707
PKS	20.563	Gelora	1.413	Hanura	1.201
Ummat	953	PKN Garuda	340	Perindo	378
		PAN	633		
		PBB	70.055		
		Demokrat	1.189		
		PSI	12.376		
	67.010		744		
			122.456		
Total		Total		Total	17.395
	(32,39%)		(59,20%)		(8,41%)

Sumber : Data Publikasi KPU, diolah oleh peneliti 2025

Berdasarkan data tersebut partai pengusung pasangan Anies-Muhaimin yaitu PKB dan Nasdem mengalami kenaikan perolehan suara drastis. PKB mengalami peningkatan suara sebanyak 196%, hampir dua kali lipat. Sedangkan kenaikan berdasarkan persentase tertinggi adalah Nasdem dengan 466%. Sementara itu PKS menjadi satu-satunya partai pengusung pasangan Anies-Muhaimin yang memperoleh penurunan suara sebanyak 23%. Peneliti berasumsi bahwa peningkatan suara partai Nasdem dan PKB merupakan efek ekor jas dari pasangan Anies-Muhaimin. Pada Pemilu 2024 lalu sangat banyak ditemui caleg yang memasang foto Anies baswedan. Mereka memanfaatkan isu terkait paslon tersebut sebagai strategi untuk mendulang suara. Sejalan dengan hal tersebut mayoritas partai pengusung Prabowo-Gibran dan Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan pada Pemilu 2024.

Gambar 1.2 Postingan Salah Satu Caleg Dengan Mendukung Dan Menampilkan Anies Baswedan



Sumber : Instagram @Cindy Monica.id

Selaras dengan peningkatan drastis perolehan suara partai pendukung pasangan Anies-Muhaimin terutama Partai Nasdem, hal ini tidak terlepas dari strategi Caleg untuk mendukung isu-isu terkait Paslon Presiden. Tampak salah satu Caleg Nasdem Cindy Monica mengkampanyekan Desak Anies Sumbar dan Memasang alat Peraga Kampanye berupa baliho sebagai bentuk dukungan. Cindy monica dalam postingannya mendukung kampanye Anies yang mengutamakan gagasan dan diskusi dengan publik yang dimana masyarakat dapat menguji kapabilitas dan keseriusan calon presiden.

Gambar 1.3 Pemberian Bantuan Oleh Arisal Aziz Salah Satu Caleg DPR-RI Dapil Sumbar 2

20 Ambulans Bantuan Caleg DPR RI PAN Arisal Aziz Siap Melayani Masyarakat Dapil Sumbar 2

Kamis, 26/10/23 | 07:57 WIB | 10 Berita

Post Views: 361



Sumber : amanmakmur.com

Salah satu argumen mengapa patron-klien dan politik uang marak terjadi menurut Burhanuddin Muhtadi adalah kebudayaan. Patron-klien dinilai sebagai produk sosial-budaya di mana kelompok yang mempunyai keistimewaan tertentu (*patrons*) memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan atas loyalitas pengikutnya (*clients*)³⁶. Pemberian bantuan merupakan salah satunya, secara tidak langsung pemberian hadiah oleh kandidat yang akan berkontestasi akan memiliki dampak elektoral kepadanya pada saat pemilihan. selain bentuk pemberian bantuan mobil ambulans diatas yang termasuk ke dalam bentuk politik uang (*services and activities*). Politik uang dengan bentuk pemberian barang pribadi, barang kelompok sangat marak terjadi di Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Legislatif 2024. Maraknya praktik politik uang tersebut karena hal tersebut dianggap wajar dan telah menjadi budaya oleh masyarakat dalam Pemilu.

Terdapat banyak persamaan dari kedua kandidat tersebut. Pertama, memiliki dana kampanye yang berlimpah dan memiliki basis massa yang berasal

³⁶ Burhanuddin Muhtadi. 2013. Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara 'Party-Id' Dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*. 10(1) Hlm.44.

dari daerah yang sama yaitu pemilih asal pariaman laweh, sebutan untuk Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Kedua adalah nomor urut yang diberikan partai, PAN dan Nasdem sama-sama memberikan nomor urut 1 kepada mereka. Kendati, di dalam partai tersebut ada kader petahana maupun yang lebih senior. Ketiga, sekaligus yang paling mencolok adalah dana kampanye yang banyak, hal ini dapat dilihat dari banyaknya atribut kampanye kedua calon yang memenuhi Kab/Kota di daerah pemilihannya terutama di Padang Pariaman.

Sangat menarik untuk menggali fenomena *coattail effect* jika melihat perolehan suara Arisal Azis yang sangat superior bahkan hampir menandingi perolehan suara Prabowo-Gibran di Padang Pariaman. Ketika pada umumnya caleg memanfaatkan popularitas capres, Arisal justru hampir mengalahkan capres yang diusung oleh partainya. Berdasarkan data diatas, tampak kepercayaan publik untuk politisi pemula di Kabupaten Padang Pariaman sangat terbuka. Karena banyaknya faktor yang mempengaruhi Pemilih di Kabupaten Padang Pariaman dalam memilih. Maka, tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 3 mazhab dalam perilaku memilih. Berdasarkan data dan temuan tersebut, peneliti memutuskan untuk melihat perilaku memilih masyarakat Padang Pariaman dari ketiga jenis pendekatan yaitu mazhab sosiologis yaitu asal daerah, mazhab psikologis yaitu *coattail effect* (efek ekor jas) dan mazhab ekonomis yaitu *money politics* (politik uang). Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana hubungan asal daerah dengan perilaku memilih masyarakat Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Legislatif DPR-RI tahun 2024.

2. Bagaimana hubungan efek ekor jas dengan perilaku memilih masyarakat Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Legislatif DPR-RI tahun 2024.
3. Bagaimana hubungan politik uang dengan perilaku memilih masyarakat Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Legislatif DPR-RI tahun 2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan hubungan antara asal daerah dengan perilaku memilih masyarakat Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Legislatif DPR-RI tahun 2024.
2. Untuk menjelaskan hubungan antara efek ekor jas dengan perilaku memilih masyarakat Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Legislatif DPR-RI tahun 2024.
3. Untuk menjelaskan hubungan politik uang dengan perilaku memilih masyarakat Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Legislatif DPR-RI tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Secara Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam menjelaskan hubungan asal daerah, *coattail effect* dan *money politics* dalam perilaku memilih masyarakat pada Pemilihan Legislatif

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi wawasan baru baik bagi para politisi maupun kepada masyarakat umum. Serta dapat sebagai bahan kajian akademis untuk akademisi selanjutnya.

